

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, O. S. (1985). *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Erlangga.
- Afandi, F., Meliala, N. C., & Akbar, M. F. (2021). *Laporan Hasil Eksaminasi Publik Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI Terdakwa Pinangki Sirna Malasari*.
- Akbari, A. R., Saputro, A. A., & Marbun, A. N. (2017). *MEMAKNAI DAN MENGUKUR DISPARITAS: Studi terhadap Praktik Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi* (Cetakan Pertama). Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia - USAID.
- Amin, I. (2018). Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jatiswara Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 33 No(Maret 2018).
<https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jatiswara.v33i1.152>
- Anugerah, A. R., Saputro, A. A., & Marbun, A. N. (2017). *MEMAKNAI DAN MENGUKUR DISPARITAS: Studi terhadap Praktik Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi* (Cetakan Pe). Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia - USAID. <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2017/10/Disparitas-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf>
- Black, H. C., & Nolan, J. R. (1990). *Black's law dictionary : definitions of the terms and phrases of American and English jurisprudence, ancient and modern* (6th Editio). West Publishing co.

- Daniel, H. E. (2012). *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*. Raja Grafindo Persada.
- Halim, D. (2021). Terima Suap dari Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Divonis 10 Tahun Penjara. *KOMPAS.Com*.
- Hananta, D. (2018). PERTIMBANGAN KEADAAN-KEADAAN MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN DALAM PENJATUHAN PIDANA / AGGRAVATING AND MITIGATING CIRCUMSTANCES CONSIDERATION ON SENTENCING. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(1), 87. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.87-108>
- Harahap, M. Y. (2009). *PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Edisi Kedu). Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. (2015). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Pub. L. No. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 (1945).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I, Pub. L. No. 16 Tahun 2004 (2004).
- Izzudin. (2019, September 21). Alasan Kenapa Korupsi Masih Terus Terjadi di Indonesia. *Kumparan*.

Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI, (2021).

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebccd3eb9f5a1ebcf2313234363532.html>

Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.

Makanoneng, D. (2016). Cacat Kejiwaan sebagai Alasan Penghapus Pidana. *Lex Crimen, Vol. V/No.*

Mardatillah, A. (2021). *Putusan Banding Pinangki Dinilai Cederai Rasa Keadilan, Begini Pandangan KY*. Hukumonline.Com.

Mertokusumo, S., & Pitlo, A. (1993). *Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti.

Moeljatno. (2008a). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Cetakan ke). Rineka Cipta.

Moeljatno. (2008b). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi* (Edisi Revi). Rineka Cipta.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA. www.djpp.kemenumham.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 5 127 (1946).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pub. L. No. Nomor 20 Tahun 2001, 123 Sekretariat Negara 2176 (1999).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pub. L. No. 28 Tahun 1999 (1999).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pub. L. No. Nomor 31 Tahun 1999, Sekretariat Negara (1999).

Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pub. L. No. Nomor 53 Tahun 2010 (2010).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pub. L. No. Nomor 8 Tahun 2010 (2010).

Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst, (2020).

Pramesti, T. J. A. (2013). *Apakah Seorang yang Gila Bisa Dipidana?* Hukumonline.Com.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515e437b33751/apakah-seorang-yang-gila-bisa-dipidana/>

Prinst, D. (2002). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. PT. Citra Aditya Bakti.

Rizal, J. (2021, July 7). Kilas Balik Kasus Jaksa Pinangki, dari Viral di Medsos hingga Keengganan JPU Ajukan Kasasi. *Kompas*.
<https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/07/200500965/kilas-balik-kasus-jaksa-pinangki-dari-viral-di-medsos-hingga-keengganan-jpu?page=all>

Sabat, O. (2021, November 5). Pengertian Hukum Menurut Para Ahli dan Penggolongannya. *Detik.Com*.

Schafmeister, D., Keijzer, N., & Sutorius, P. E. (2007). *Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN, Pub. L. No. Nomor 48 Tahun 2009 (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>

- Setiadi, W. (2018). KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, Vol 15 No. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/234/pdf>
- Sihite, A. (2020). *DASAR PERINGANAN PEMIDANAAN PELAKU PENYELUNDUPAN DI BIDANG IMPOR*. Universitas HKBP Nommensen.
- Susanti, D. O., & Efendi, A. (2019). Memahami Teks Undang-Undang dengan Metode Interpretasi Eksegetikal. *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 41, N. <https://doi.org/10.24843/KP.2019.v41.i02.p05>
- Team Izinesia. (2020). *Alasan Keringanan Suatu Hukuman Pidana*. Izinesia.
- Tuanakotta, T. M. (2009). *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Salemba Empat.
- Wiyono, R. (2016). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Edisi ke-4). Sinar Grafika.
- Zen, A. P. M., & Hutagalung, D. (2006). *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia* (Edisi 2006). Sentalisme Production.